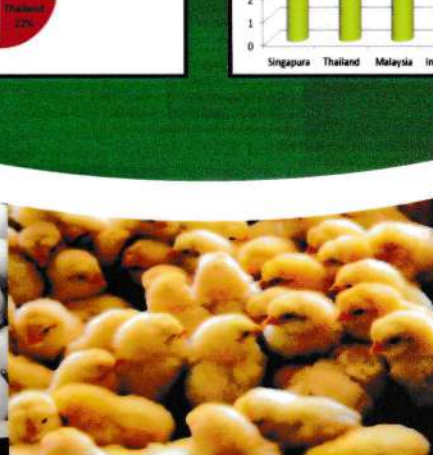
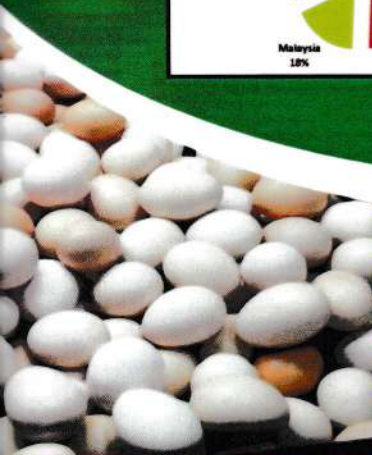
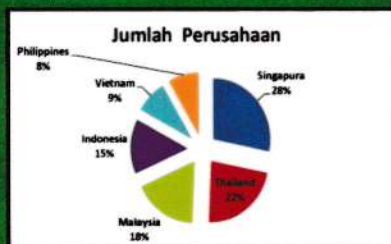
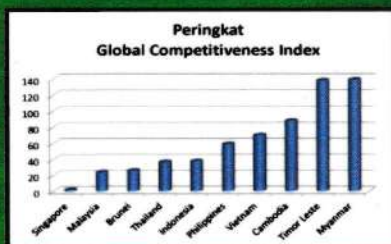


KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDUSTRI PERUNGGAN MENJELANG PASAR TUNGGAL ASEAN 2015



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2014**

KEBIJAKAN DAN STRATEGI INDUSTRI PERUNGGAN MENJELANG PASAR TUNGKAL ASEAN 2015



Penyusun:

Tjeppy D. Soedjana
Sjamsul Bahri
Budi Haryanto
Wisri Puastuti
Atien Priyanti

Hak Cipta @ 2014 Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Peternakan

Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59

Bogor, 16151

Tel. : (0251) 8322185

Fax : (0251) 8328382; 8380588

Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan dan Strategi Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015 /
T.D. Soedjana, Sjamsul Bahri, B. Haryanto, W. Puastuti dan A. Piyanti. – Bogor: Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2014: vi + 42 hlm; illus.; 16 x 20,5 cm.

ISBN : 978-602-8475-84-6

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| 1. Kebijakan & Strategi | 2. Industri Perunggasan | 3. Pasar Tunggal ASEAN |
| I. Judul; | II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan; | |
| III. Soedjana, T.D. | | |

338.43.02/636.5

Penanggung Jawab: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Tata letak dan rancangan sampul : Asep M

KATA PENGANTAR

Indonesia membutuhkan persiapan serius dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN (*Asean Economic Community/AEC*) pada tahun 2015. Komunitas ini tidak hanya terbatas pada mewujudkan suatu pasar tunggal yang terintegrasi, tetapi juga meningkatkan daya saing ASEAN di pasar dunia, seperti yang tercantum dalam *Blue Print AEC* yang ditandatangani oleh 10 kepala negara anggota ASEAN. Pernyataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi untuk menjadikan ASEAN sebagai komunitas yang dinamis dan berdaya saing. Mekanisme dan ukuran yang baru akan diperkuat untuk melaksanakan inisiatif ekonomi, percepatan wilayah dalam integrasi sektor prioritas, fasilitasi gerakan bisnis, tenaga ahli, dan memperkuat mekanisme institusi. Sektor strategis yang mendapatkan perhatian serius adalah pangan, pertanian dan kehutanan.

Pasar Tunggal ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2015 merupakan uji awal dari kesiapan berbagai sektor di Indonesia, termasuk perunggsan. Sebelum menghadapi tantangan pasar global yang lebih berat, terutama dalam menghadapi persaingan dari produsen perunggsan yang paling efisien di dunia seperti Amerika Serikat dan Brazil. Industri perunggsan telah membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan produk pangan hewani berupa daging ayam dan telur yang sangat terjangkau bagi penduduk Indonesia. Produk perunggsan di Indonesia merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Partisipasi konsumsi daging unggas mencapai 57,1% sedangkan telur sudah mencapai 79,9%, dimana capaian ini merupakan angka tertinggi dibanding dengan produk pangan hewani lainnya. Dengan demikian, produk perunggsan nasional telah memposisikan dirinya sebagai komponen penguatan ketahanan pangan hewani bagi Indonesia. Pada saat ini budidaya unggas di dalam negeri

baik broiler maupun petelur sudah dianggap modern, namun masih menghadapi masalah dalam hal komponen input produksi yang sebagian besar masih mengandalkan impor, serta pasca panen, pemasaran dalam bentuk *live bird* dan panjangnya rantai tataniaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) telah mengadakan *roundtable meeting* dengan tema "Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015". Diskusi ini menghadirkan beberapa nara sumber terkait dan didokumentasikan dalam *booklet* ini.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi sehingga *booklet* ini dapat diterbitkan. Semoga berbagai informasi yang dimuat dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk mempersiapkan berbagai strategi dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN pada akhir tahun 2015.

Bogor, Juli 2014
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian



Dr. Ir. Haryono, MSc.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | v |
| Pendahuluan | 1 |
| Tahapan Kegiatan | 3 |
| Sasaran dan Tujuan | 5 |
| Daya Saing Indonesia Terhadap Negara-Negara Asean | 6 |
| Perspektif Perunggasan dalam Pasar Tunggal ASEAN 2015 | 11 |
| Kondisi Industri Pembibitan Unggas | 13 |
| Kebijakan Volume dan Harga Produk Unggas | 18 |
| Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk Perunggasan | 20 |
| Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi Kebijakan | 22 |
| Matriks Rencana Tindak Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015 | 24 |
| Daftar Bacaan | 26 |
| Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Pternakan dan Veteriner | 28 |
| Tim Perumus | 29 |
| Lampiran | 31 |
| Sektor Perunggasan Jelang ASEAN Economic Community (AEC) | 33 |
| Broiler Information dan Estimasi Produksi Tahun 2014 | 35 |
| Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk Perunggasan Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015 | 37 |

| | |
|--|----|
| Tantangan, Kendala dan Strategi Usaha Perunggasan dalam Peningkatan Daya Saing Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015 | 39 |
| Indonesian Poultry Industry: Challenges and Opportunity | 41 |

PENDAHULUAN

Produk perunggsan di Indonesia merupakan komoditas strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Industri ini berkontribusi sekitar 60% dalam penyediaan pangan hewani asal ternak, dengan tingkat partisipasi konsumsi 57,1% (daging) dan 79,9% (Telur). Industri perunggsan telah membuktikan kemampuannya dalam menghasilkan produk pangan hewani berupa daging ayam dan telur yang sangat terjangkau bagi penduduk Indonesia. Hal ini juga menunjukkan bahwa industri perunggsan telah memposisikan diri sebagai komponen penguatan ketahanan pangan hewani bagi Indonesia. Di tengah kontribusi yang sangat nyata tersebut, industri perunggsan masih terjebak dalam perangkat importasi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan utamanya oleh impor dari tetua ayam ras (*Grand Parent Stock* = GPS), maupun bahan sumber pakan seperti jagung, tepung ikan, bungkil kedelai, dan lain-lain.

Pasar Tunggal ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2015 merupakan uji awal dari kesiapan berbagai sub sektor di Indonesia, termasuk perunggsan, sebelum menghadapi tantangan pasar global yang lebih berat. Tantangan pasar global perunggsan antara lain menghadapi persaingan dari produsen perunggsan yang paling efisien di dunia seperti Amerika Serikat dan Brazil. Namun demikian, Pasar Tunggal ASEAN dapat dipandang sebagai suatu ancaman bagi produk yang dihasilkan di dalam negeri pada satu sisi, dan pada perspektif lain sebenarnya hal ini juga menjadi suatu peluang yang dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor Indonesia tanpa hambatan.

Relatif serupa dengan Indonesia, produk unggas merupakan komoditas strategis bagi sebagian besar negara-negara ASEAN dalam memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakatnya. Mempertimbangkan Indonesia sebagai pasar

yang sangat potensial, telah menyebabkan gencarnya industri perunggasan negara tetangga untuk memasarkan produknya ke Indonesia. Dengan alasan ini, industri perunggasan nasional perlu mempersiapkan diri dan memperkuat daya saing di dalam negeri. Dengan demikian perkembangan industri perunggasan nasional yang merupakan salah satu penggerak pertumbuhan dalam sektor pertanian harus didukung oleh kebijakan strategis yang operasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 6 Mei 2014 telah dilaksanakan *roundtable meeting* yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan saran kebijakan operasional yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing industri perunggasan nasional menuju Pasar Tunggal ASEAN 2015. Pencapaian tujuan tersebut diharapkan dapat merumuskan opsi/alternatif saran kebijakan terkait dengan pengembangan industri perunggasan nasional menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015.

TAHAPAN KEGIATAN

Perkembangan industri perunggasan nasional yang merupakan salah satu penggerak pertumbuhan sektor pertanian harus didukung oleh kebijakan strategis yang operasional. Kompas (14-16 April 2014) memuat isu strategis tentang 3 (tiga) paket kebijakan unggas yang digagas oleh Kementerian Perdagangan, meliputi: (i) penetapan harga referensi untuk ayam dan telur di tingkat produsen (*peternak/farm gate*), (ii) pengaturan pasokan ayam umur sehari (*day old chicken* = DOC), dan (iii) pengurangan impor induk ayam (GPS). Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin kelangsungan industri perunggasan nasional yang diharapkan mampu menjamin usaha yang berkelanjutan bagi peternak unggas skala kecil dan menengah. Kebijakan tersebut dipandang sangat strategis jika dikaitkan dengan Pasar Tunggal ASEAN yang akan berlangsung kurang dari 2 (dua) tahun ke depan.

Industri perunggasan nasional memiliki *stakeholders* yang cukup luas, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Kementerian dan kelembagaan lainnya yang memiliki wewenang dan peran dalam program perunggasan nasional disamping Kementerian Pertanian adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kesehatan, Riset dan Teknologi, Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu dukungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) juga tidak kalah pentingnya, demikian pula dengan *stakeholders* lainnya kelompok peternak.

Yang digagas oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan melalui Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Peternakan dan Veteriner (KAR-KSPV) *Roundtable meeting* (RTM) telah menghadirkan beberapa narasumber

terkait menghadirkan berbagai opsi kebijakan peningkatan daya saing industri perunggasan, utamanya dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015.

Narasumber dari kegiatan ini meliputi:

1. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, dengan topik bahasan "Sektor Perunggasan Jelang ASEAN *Economic Community* (AEC) "
2. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (Indonesia), dengan topik bahasan "Broiler Information dan Estimasi Produksi Tahun 2014"
3. Lembaga Survey Sucofindo, dengan topik bahasan "Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Produk Perunggasan Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015"
4. Ketua Umum PINSAR, dengan topik bahasan "Tantangan, Kendala dan Strategi Usaha Perunggasan dalam Peningkatan Daya Saing Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015"
5. Direktur Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor, sebagai pembahas utama dengan topik bahasan "Indonesian Poultry Industry: Challenges and Opportunities".

Pertemuan ini dihadiri oleh 50 peserta dari lingkup Asisten Kedeputan Bidang Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan (Dit. Pusat Kebijakan Kerjasama Perdagangan Internasional, Dit. Pusat Data dan Informasi Perdagangan), Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Litbang Pertanian), Perguruan Tinggi (UNPAD, IPB), Dinas Peternakan (Jawa Barat), Asosiasi Perunggasan (GPPU, FMPI dan ASOHI) dan organisasi profesi (PB-PDHI dan PB-ISPI).

SASARAN DAN TUJUAN

SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari diskusi ini adalah mewujudkan kesadaran tentang pentingnya industri perunggasan domestik untuk melakukan persiapan di berbagai bidang dalam upaya meningkatkan daya saing melalui efisiensi usaha dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015.

TUJUAN

Penyelenggaraan RTM ini bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi dari berbagai narasumber untuk keperluan sintesis dan analisis selanjutnya yang mengarah kepada berbagai opsi kebijakan yang diperlukan dalam menyusun peraturan dan pengaturan yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing industri perunggasan nasional menuju Pasar Tunggal ASEAN 2015.

DAYA SAING INDONESIA TERHADAP NEGARA-NEGARA ASEAN

Anggota ASEAN sudah menyepakati beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan AEC 2015, antara lain: (i) pasar tunggal dan basis produksi, (ii) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (iii) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan (iv) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Dalam hal ini ASEAN berperan sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan modal secara lebih bebas. Apakah Indonesia dapat mengambil kesempatan dan berperan besar dalam kawasan ini, akan sangat ditentukan oleh persiapan yang dilakukan dalam menghadapi persaingan ini, terutama dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2015. Tanpa persiapan yang matang, Indonesia hanya akan menjadi pasar dan konsumen bagi produk dan jasa negara lain.

Kunci sukses menghadapi AEC 2015 adalah daya saing. Indeks Daya Saing Global/Global Competition Index (GCI) yang dirilis secara regular oleh World Economic Forum (WEF), menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke 38 dari 148 negara pada 2013-2014 dengan skor sebesar 4.54 (nilai 1 – 7). Peringkat ini menunjukkan kenaikan dibandingkan pada tahun sebelumnya pada peringkat ke-50. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi ke 5 dibawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Thailand (Tabel 1). Indonesia termasuk dalam tahapan pembangunan *efficiency-driven economy* dengan pendapatan per kapita berada dalam kisaran 3.000 – 8.999 USD/kapita/tahun (World Economic Forum, 2013-2014).

Tabel 1. Indeks Daya Saing Negara-negara ASEAN

| Negara | Peringkat | Nilai |
|-------------------|-----------|-------------|
| Singapura | 2 | 5.61 |
| Malaysia | 24 | 5.03 |
| Brunei Darussalam | 26 | 4.95 |
| Thailand | 37 | 4.54 |
| Indonesia | 38 | 4.54 |
| Philippines | 59 | 4.29 |
| Vietnam | 70 | 4.18 |
| Cambodia | 88 | 4.01 |
| Timor Leste | 138 | 3.25 |
| Myanmar | 139 | 3.23 |

Sumber : *World Economic Forum* (2014)

Tiga persyaratan yang digunakan untuk mengukur indikator daya saing ini adalah: (1) Persyaratan Dasar, yang terdiri dari (i) institusi, (ii) infrastruktur, (iii) makroekonomi, dan (iv) kesehatan dan pendidikan dasar; (2) Persyaratan Pendorong Efisiensi, termasuk: (i) pendidikan tinggi dan pelatihan, (ii) efisiensi pasar barang, (iii) efisiensi pasar tenaga kerja, (iv) perkembangan pasar finansial, (v) kesiapan teknologi, dan (vi) ukuran pasar; serta Persyaratan Inovasi dan Kepuasan meliputi: (i) kepuasan bisnis, dan (ii) inovasi. Menggunakan indikator tersebut, Malaysia dan Singapura menjadi pesaing ketat Indonesia dan negara ASEAN lainnya (Tabel 2). Dengan demikian, Indonesia harus mampu bersaing dengan Philippina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Myanmar. Indeks daya saing tertinggi yang dimiliki Indonesia ada pada ukuran pasar, dengan skor tertinggi di ASEAN, karena memiliki penduduk terpadat di Asia Tenggara.

Tabel 2. Indikator Daya Saing Negara-negara ASEAN

| Negara | Persyaratan Dasar | | | | | Pendorong Efisiensi | | | | | Inovasi dan Kepuasan | |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|-----------|
| | Inst- itusi | Infra- struktur | Makro Ekonomi | Kshtan & Pend | Pend & Latihan | Pasar Barang | Pasar TK | Finan sial | Tekn ologi | Ukuran pasar | Bisnis | Inovasi |
| Singapura | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 34 | 17 | 9 |
| Malaysia | 29 | 29 | 38 | 33 | 46 | 10 | 25 | 6 | 51 | 26 | 20 | 25 |
| Brunei | | | | | | | | | | | | |
| Darussalam | 25 | 58 | 1 | 23 | 55 | 42 | 10 | 56 | 71 | 131 | 56 | 59 |
| Thailand | 78 | 47 | 31 | 81 | 66 | 34 | 62 | 32 | 78 | 22 | 40 | 66 |
| Indonesia | 67 | 61 | 26 | 72 | 64 | 50 | 103 | 60 | 75 | 15 | 37 | 33 |
| Philippines | 79 | 96 | 40 | 96 | 67 | 82 | 100 | 48 | 77 | 33 | 49 | 69 |
| Vietnam | 98 | 82 | 87 | 67 | 95 | 74 | 56 | 93 | 102 | 36 | 98 | 76 |
| Cambodia | 63 | 84 | 93 | 80 | 111 | 54 | 44 | 91 | 113 | 122 | 78 | 68 |
| Timor | | | | | | | | | | | | |
| Leste | 91 | 101 | 83 | 99 | 116 | 55 | 27 | 65 | 97 | 92 | 86 | 91 |
| Myanmar | 141 | 141 | 125 | 111 | 139 | 135 | 98 | 144 | 148 | 79 | 146 | 143 |

Sumber: *World Economic Forum* (2014)

Dengan populasi 240 juta jiwa sudah selayaknya Indonesia menjadi pasar potensial bagi produk dan jasa, apalagi dengan jumlah kelas menengah yang lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Jumlah kelas menengah ini sangat mampu mendorong peningkatan konsumsi pangan hewani, seperti daging, telur dan susu. Pada sektor industri perunggasan, daging dan telur unggas sudah sekian lama menjadi andalan sebagai pemasok protein hewani yang terjangkau bagi penduduk Indonesia dengan elastisitas pendapatan yang sudah dibawah 1.0. Artinya produk perunggasan sudah terjangkau oleh daya beli masyarakat pada umumnya fakta ini seharusnya mampu menjadikan industri perunggasan nasional untuk semakin termotivasi dalam meningkatkan efisiensinya, baik secara teknis produksi atau budidaya maupun pemasarannya.

Upaya untuk lebih memperluas partisipasi potensial konsumen daging unggas di Indonesia nampaknya akan menjadi satu pilihan tepat yang rasional untuk memperluas pasar daging dan telur unggas. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan lain yang hanya dapat diatasi dengan meningkatkan daya saing terutama pada komponen yang termasuk dalam Persyaratan Dasar maupun Pendorong Efisiensi Usaha. Disamping itu, produktifitas tenaga kerja dan daya saing Indonesia yang secara umum juga masih rendah dibanding negara lain, harus menjadi pendorong utama untuk lebih meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015.

World Economic Forum (2013-2014) melaporkan bahwa faktor permasalahan utama dalam melakukan bisnis di Indonesia adalah birokrasi pemerintah yang belum efisien (15%), ketersediaan infrastruktur yang belum memadai (9.1%) dan rendahnya akses terhadap lembaga keuangan (6.9%). Birokrasi pemerintah dinilai masih rumit, utamanya dalam melaksanakan perijinan usaha dan kendala beberapa peraturan yang tidak selaras baik di tingkat pusat dan daerah.

Pembangunan infrastruktur dipandang sangat lambat, sehingga kinerja logistik di Indonesia menjadi tidak optimal. Fakta kinerja pada komponen ini relatif sangat jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kinerja logistik di Singapura dan Malaysia, yang masing-masing telah menduduki peringkat ke-2 dan 29. Demikian pula halnya dengan rendahnya dukungan lembaga keuangan (eg. perbankan), karena sampai saat ini suku bunga acuan Bank Indonesia mencapai 7.5%, merupakan angka tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Hal-hal tersebut perlu mendapat tindak lanjut yang serius dalam pengembangan industri perunggasan dalam menyongsong Pasar Tunggal ASEAN 2015.

PERSPEKTIF PERUNGGANAN DALAM PASAR TUNGGAL ASEAN 2015

Pasar Tunggal ASEAN harus dipandang sebagai peluang pasar yang sangat besar bagi industri perunggasan baik di dalam negeri maupun di pasar regional, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang sangat signifikan. ASEAN merupakan mitra dagang utama ekspor non migas bagi Indonesia dengan pangsa 20,05%, diikuti oleh Tiongkok dan Uni Eropa dengan pangsa masing-masing sebesar 14,2% dan 11,1%. Selama periode 2009-2013, defisit neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN cenderung meningkat dan relatif menurun pada bulan Januari-Februari 2013 (Kemendag, 2014). Hal ini merupakan tantangan utama bagi Indonesia, disamping faktor-faktor lainnya seperti tingginya laju inflasi dan instabilitas kondisi makro, pemerataan pendapatan, kesamaan keunggulan komparatif, iklim usaha kondusif, kinerja UMKM, dan konektivitas yang belum tertata baik.

Produk perunggasan bukan merupakan komoditas impor utama bagi Indonesia, dimana impor utama didominasi oleh mesin, elektronik dan kendaraan. Pertumbuhan impor komponen produksi unggas menurun sangat signifikan dari USD 3.512.011 pada tahun 2009 menjadi USD 3.152.000 pada tahun 2013. Produk unggas termasuk dalam kriteria *inclusion list*, dimana sejak tahun 2010 Indonesia bersama 5 negara ASEAN lainnya telah menerapkan 0% bea masuk. Penghapusan *tariff inclusion list* bagi Vietnam, Laos, Myanmar dan Cambodia baru akan dilaksanakan pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan terbukanya peluang pasar yang cukup besar bagi produk unggas Indonesia untuk melakukan ekspor ke negara-negara tersebut (Kemendag, 2014).

Pada saat ini ASEAN belum melakukan harmonisasi standar untuk produk unggas, sehingga Indonesia masih dapat menerapkan standar sesuai dengan SNI dengan kualitas yang

harus terus ditingkatkan. Disamping itu pengamanan pasar produk unggas di dalam negeri, masih dapat dilakukan karena ASEAN belum melakukan *review* secara mendalam terhadap penerapan kebijakan *non-tariff barrier*. Dengan demikian, Indonesia perlu mempersiapkan model-model standar yang akan ditetapkan sebagai *non tariff barrier* pada produk 12ngags.

KONDISI INDUSTRI PEMBIBITAN UNGGAS

Pada saat ini potensi produksi ayam umur sehari (DOC) broiler pada tahun 2014 mencapai 2,47 Milyar ekor dengan rata-rata produksi sebesar 47 juta ekor per minggu dan DOC layer mencapai 2,25 juta ekor per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa industri perunggasan memiliki peran yang sangat strategis sebagai pemasok utama protein hewani asal ternak. Tingkat perputaran uang per tahun mencapai lebih dari Rp. 50 Trilyun baik pada tingkat industri pembibitan, pabrik pakan, budidaya, obat-obatan/vaksin dan peralatan, serta menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 3,75 juta tenaga kerja. Indonesia masih sangat tergantung terhadap pasokan impor GPS, yang meningkat sebesar 22,45% dan 35,10% untuk broiler dan layer pada periode tahun 2012-2013. Diperkirakan angka tersebut dapat menurun secara signifikan pada tahun 2014, masing-masing sebesar 206,47% (216.867 ekor) dan 255,52% (12.290 ekor) untuk broiler dan layer (GPPU, 2014).

Industri pembibitan di dalam negeri sebenarnya sangat siap menghadapi persaingan pada saat diberlakukannya Pasar Tunggal ASEAN, sekalipun harus bersaing dengan negara yang paling kuat seperti Thailand dan Malaysia. Hal ini disebabkan oleh kondisi usaha pembibitan unggas yang sudah ditopang oleh teknologi tinggi, padat modal dan modern. Harga jual DOC di Indonesia sudah hampir sama dengan Thailand dan Malaysia yaitu sekitar Rp 4.000 per ekor (Utoyo, 2014). Perbedaannya adalah pada komponen impor, seperti GPS yang masih belum dapat diproduksi sendiri didalam negeri. Karena biaya *research and development* yang sangat mahal. Akankah Indonesia mampu memiliki GPS sendiri? Secara teoritis memungkinkan sepanjang memiliki modal, namun hal ini pernah dicoba untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan swasta mengalami kegagalan.

Setiap ekor GPS dapat menghasilkan sekitar 40-45 ekor PS, dan seekor PS dapat menghasilkan 130-140 FS. Dengan demikian, perencanaan dan pengaturan populasi GPS menjadi sangat penting, misalnya pada tahun 2011 terjadi kekurangan GPS yang menyebabkan kurangnya PS sehingga angka impor meningkat dari 80 ribu ekor menjadi 600 ribu ekor. Untuk posisi saat ini, dari sisi jumlah dengan produksi 2,5 Milyar ekor, sebenarnya sangat mencukupi untuk konsumsi di dalam negeri. Namun demikian, dalam menghadapi Pasar Tunggal ASEAN masih diperlukan kiat-kiat tertentu, perkembangan industri pembibitan yang sudah lebih maju dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu, masalah klasik yang dihadapi seperti *over produksi*, *over supply* masih terus dijumpai untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengatur keseimbangan ini melalui berbagai kebijakan yang sinergis dari Kementerian Pertanian, Perdagangan dan kementerian lain yang erat kaitannya dengan industri perunggasan.

Peningkatan impor GPS dari tahun ke tahun ditengarai sebagai penyebab kerugian peternak yang berkepanjangan sejak akhir tahun 2013. Harga ayam hidup (*live bird*) berada jauh dibawah harga pokok produksi (HPP) yang disebabkan oleh harga DOC dan pakan yang terus meningkat. *Over supply* diduga terjadi akibat perusahaan pembibitan memproduksi DOC broiler melebihi angka kebutuhan, disamping banyak bermunculan *breeding farm* baru baik di Jawa maupun luar Jawa. Kondisi tersebut telah direspon oleh Kementerian Perdagangan dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan No 644/2014 pada tanggal 15 April 2014 tentang Harga Penjualan DOC di Tingkat Peternak. Kebijakan ini meminta *breeding farm* agar menjual DOC dengan harga maksimal Rp.3.200/ekor dan mengurangi produksi telur tetas baik untuk broiler maupun layer sebesar 15%. Pemerintah juga menghimbau proporsi distribusi DOC sebesar 70% untuk memenuhi kebutuhan peternak mandiri dan 30% bagi peternak

mitra perusahaan. Kebijakan ini masih dalam taraf uji coba, dan berlaku selama satu bulan.

Kedepan untuk menghindari kondisi serupa maka diperlukan perkiraan produksi DOC yang cermat ditunjang dengan data yang akurat bagi tingkat konsumsi daging dan telur ayam masyarakat Indonesia. Berbagai sumber data saat ini menunjukkan variasi yang besar, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap cara maupun penyajiannya secara tepat. Tingkat konsumsi produk unggas masyarakat Indonesia yang relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia menunjukkan bahwa industri perunggasan memiliki prospek yang sangat baik ke depan. Industri ini perlu terus didorong untuk dapat lebih berdaya saing guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sekaligus peluang pasar ekspor ke negara-negara ASEAN.

Angka prediksi produksi sebesar 50 juta ekor/minggu seharusnya telah didasarkan kepada kalkulasi yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti penyakit dan iklim, bukan merupakan angka perkalian antara produksi GPS menjadi PS dan akhirnya menjadi DOC. Data FAO menunjukkan bahwa konsumsi daging ayam per kapita saat ini baru mencapai 4,5 kg per kapita per tahun, dibandingkan dengan angka FMPI sekitar 7,8 kg per kapita per tahun (Utoyo, 2014). Hal tersebut untuk tingkat konsumsi di Malaysia sekitar 40 kg per kapita per tahun. Menurut perkiraan Wakil Menteri Perdagangan angka konsumsi tersebut akan meningkat sampai 14-15 kg per kapita per tahun pada tahun 2017, walaupun masih menyisakan pertanyaan bagaimana kemampuan pasar menyerapnya termasuk kemampuan daya beli masyarakat. Pada saat ini produksi DOC mencapai 40 juta ekor/minggu dan diprediksi pada semester II setelah lebaran akan mencapai 50 juta ekor/minggu. Angka prediksi ini cukup mengkhawatirkan karena harga DOC dapat turun sampai Rp 500-1.000/ekor padahal biaya produksinya

mencapai Rp 4.250/ekor. Kerugian sebesar Rp 3.250 sampai Rp 3.750/ekor akan memunculkan angka yang fantastis pada skala produksi 50 juta ekor. Bantuan pemerintah sangat diharapkan pada terjadinya kasus seperti ini.

Kebijakan pengambil keputusan untuk mengurangi bibit sudah dilakukan oleh pelaku usaha pembibitan dengan menurunkan produksi antara 15-25% per minggu, yang juga dapat dilakukan dengan mengurangi impor GPS. Pengaturan ini harus dilakukan dengan hati-hati karena bila pada kurun waktu dua tahun mendatang terjadi *shortage*, misalnya karena penyakit, maka yang menderita kerugian tidak hanya usaha pembibitan, tetapi juga seluruh *stakeholders* perunggasan, termasuk konsumen. Apabila jalan keluar yang ditempuh untuk mengatasi kondisi seperti ini melalui impor produk unggas, maka dengan sendirinya akan menyebabkan para peternak gulung tikar. Pada tahun 2009 sebelum ada KPPU, kondisi seperti ini dapat sedikit teratasi karena disamping produsen dapat melakukan musyawarah dalam menentukan harga. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi saat ini. Pemerintah sebenarnya dapat membuat kebijakan yang dapat menstabilkan kondisi saat ini dengan mengoptimalkan aturan-aturan yang tercantum didalam Undang-undang Pangan maupun Undang-undang Pemberdayaan Petani sebagai payung hukum Undang-undang No. 17/2014 tentang Perdagangan yang baru saja diselesaikan sudah dapat yang digunakan walaupun belum ada Peraturan Pemerintahnya.

Industri pembibitan sebenarnya sangat siap menghadapi Pasar Tunggal ASEAN, tetapi perlu dibarengi dengan penyempurnaan industri hilirnya. Saat ini, pasar tradisional masih menguasai produk perunggasan (85%), dimana baru sekitar 15% yang memenuhi produk unggas dengan kriteria aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Pada umumnya produk unggas ini dijual di supermarket maupun gerai-gerai produk daging dengan fasilitas ruang pendingin. Kedepan diharapkan

partisipasi pasar tradisional dalam memenuhi persyaratan ASUH dapat lebih ditingkatkan guna memenuhi standar higienis hingga mencapai 75%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui edukasi terhadap konsumen tentang produk unggas yang sehat. Hal lain yang sangat menentukan daya saing industri perunggasan Indonesia adalah kebijakan fiskal dan non-fiskal. Misalnya, di negara pesaing seperti Malaysia, pemerintah telah membangun dan menyediakan jalan usaha tani ke lokasi budidaya, menyediakan listrik gratis, dan bantuan bunga perbankan yang rendah sekitar 3%. Dengan demikian, daya saing perunggasan di Indonesia dapat lebih ditingkatkan karena diluar dari itu, kemampuan Indonesia sudah sama dengan Malaysia. Dengan demikian, instrumen perpajakan, infrastruktur, kredit dan kemudahan perijinan perlu menjadi bahan pertimbangan yang inklusif.

Secara keseluruhan, industri perunggasan di Indonesia dipandang belum memiliki tim yang solid untuk menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015. Untuk itu kedua jenis model usaha budidaya, modern dan tradisional sudah selayaknya didorong agar dapat berlangsung secara harmonis. Industri modern dengan pelaku usaha yang telah menerapkan teknologi harus siap menghadapi peluang ini, utamanya dalam berkompetisi dengan Thailand dan Malaysia. Di sisi lain, peternak rakyat juga harus mampu meningkatkan daya saing usahanya melalui fasilitasi pemerintah sesuai dengan elemen pengembangan UKM di negara-negara ASEAN.

KEBIJAKAN VOLUME DAN HARGA UNGGAS BESERTA PRODUKNYA

Respon pelaku usaha terhadap SE Menteri Perdagangan No 644/2014 sangat beragam. Pengamatan di lapang sampai dengan akhir April 2014 menunjukkan bahwa harga ayam hidup relatif meningkat, dari yang awalnya Rp.12.500 – Rp.15.000/kg berat hidup menjadi Rp. 16.200 – Rp. 17.500/kg berat hidup. Hal ini menunjukkan bahwa harga ini sudah sedikit berada di atas HPP, sekitar Rp.15.000/kg – Rp.17.000/kg. Sudah selayaknya Pemerintah dapat mengatur tata niaga perunggasan dengan memberikan keuntungan yang wajar bagi produsen, termasuk peternak. Hal ini meliputi harga DOC, harga ayam hidup, harga karkas daging ayam dan harga telur ayam. Dalam kondisi normal harga DOC yang wajar adalah Rp.4.500/ekor– Rp. 5.000/ekor (HPP: Rp.4.100/ekor – Rp.4.300/ekor); harga ayam hidup adalah Rp. 18.500/kg – Rp.20.000/kg (HPP: Rp.16.750/kg – Rp.17.000/kg); harga karkas daging ayam sekitar Rp.32.000/kg – Rp.35.000/kg (HPP: Rp.31.000/kg – Rp.33.000/kg); dan harga telur sebesar Rp. 18.500/kg – Rp.20.000/kg (HPP: Rp.16.500/kg – Rp. 17.000/kg) (Hartono, 2014).

Kebijakan penetapan harga DOC dibawah HPP dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pembibitan untuk jangka panjang, karena belum mempertimbangkan kelangkaan stok DOC sebagai akibat dari pemotongan produksi sebesar 15% dan dampak harga DOC yang relatif murah. Oleh karenanya, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan permintaan pasar secara nasional dan jumlah produksi DOC. Pertumbuhan produksi DOC sudah seharusnya diikuti oleh kondisi pasar yang bertumbuh, karena pada saat ini Rumah Potong Ayam (RPA) baru dapat menyerap sekitar 15% dari jumlah produksi broiler. Kondisi ini akan menyebabkan para peternak skala kecil dengan pasar utama di pasar tradisonal tersaingi oleh produk ini. Industri perunggasan belum dapat

meningkatkan jumlah RPA yang memadai karena pasar ayam beku belum sepenuhnya siap. Dengan demikian diperlukan edukasi dan promosi yang terus menerus tentang produk ayam beku sebagai produk *hygienis* yang terjangkau bagi masyarakat luas. Produk unggas beku sebenarnya dapat membantu mengatasi penyebaran penyakit unggas, seperti kasus penyakit HPAI. Demikian juga dengan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*) akan lebih meningkat, karena sarana transportasi unggas hidup yang akan semakin memadai.

Upaya lain yang diperlukan dalam hal pemasaran produk unggas adalah distribusi pemasaran yang berimbang (supermarket vs pasar tradisional), memperpendek mata rantai pemasaran, dan mendekatkan produsen langsung ke konsumen. Pasar yang masih didominasi oleh pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian agar proporsi pasar *hygienis* lebih ditingkatkan, baik melalui peningkatan kesadaran konsumen maupun penyediaan sarana-prasarana pasar *hygienis* yang lebih banyak. Memperpendek rantai pemasaran juga akan menekan harga yang harus dibayar konsumen, sehingga harga yang lebih murah dapat meningkatkan keterjangkauan dan partisipasi konsumsi produk unggas.

STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING PRODUK PERUNGGSAN

Strategi peningkatan mutu dan daya saing produk perunggsan menghadapi Pasar Tunggal ASEAN meliputi: (i) Kolaborasi proaktif dari pemangku kepentingan industri perunggsan nasional dalam membangun mutu dan daya saing; (ii) Membangun *evidence base* guna mendukung harmonisasi atas adanya perbedaan regulasi, misalnya melalui analisis mendalam terhadap regulasi nasional saat ini, identifikasi inkonsistensi penerapan, penyebab dan solusinya; (iii) Melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan perdagangan ASEAN, misalnya penerapan *non tariff barrier* pada produk berbasis unggas, yang juga merupakan keuntungan bagi industri dan ekonomi nasional maupun ASEAN; dan (iv) Konsisten mengedepankan prinsip-prinsip pengembangan regulasi baru, antara lain: *good governance*, *impact assessment*, *scientific basis-proportionality*, *non-discrimination*, serta *open consultation* (Kartabrata, 2014).

Infrastruktur yang memadai dan dukungan perbankan merupakan kunci utama dalam mendorong daya saing industri perunggsan. Untuk itu diperlukan kebijakan perbankan (utamanya bank pemerintah) untuk dapat menerapkan bunga bank yang rendah bagi peternak unggas, seperti halnya pada peternak sapi. Pemerintah dapat memberikan insentif berupa subsidi suku bunga untuk pendirian "closed-housed", rumah potong ayam dan *cold chain* guna meningkatkan daya saing industri perunggsan.

Peningkatan kemampuan daya saing produk perunggsan dapat dilakukan melalui upaya penerapan teknologi yang lebih maju, penyediaan sarana yang lebih baik, peranan pemerintah yang pro-peternak unggas, perencanaan usaha yang mantap dengan didukung oleh data yang akurat, sumberdaya manusia yang berkualitas, peraturan pemerintah yang kondusif,

penanganan kesehatan dan kesejahteraan hewan yang memadai (*animal health and welfare*), dan pengembangan model industri perunggasan yang sesuai secara nasional dengan adanya konektivitas yang baik antar wilayah.

Teknologi kandang "*closed-housed*" dapat menghambat lalu lintas keluar masuk *farm* dan memitigasi penyebaran penyakit ayam terhadap manusia. Kandang sistem ini dapat mempercepat realisasi program wilayah bebas penyakit (kompartemenalisasi). Di Malaysia, sebagai contoh, peternak ayam dengan sistem kandang "*closed-housed*" di kawasan hutan sekunder mendapat bantuan skim kredit dengan suku bunga 3% (Thailand 2%), dilengkapi dengan infrastruktur dari pemerintah berupa pembuatan jalan, jembatan, air, dan listrik. Investasi kandang ini memiliki daya tampung sebesar 20 ekor/m² dengan rata-rata bobot hidup ayam sebesar 2,2 kg/ekor, atau setara dengan 44 kg ayam hidup/m². Di Indonesia baru mencapai 14 ekor/m² dengan rata-rata bobot hidup sekitar 1,6 kg/ekor atau setara dengan 22 kg ayam hidup/m². Biaya produksi dengan sistem ini berkisar Rp.21.000/kg - Rp.24.000/kg, sedangkan di Indonesia mencapai Rp.28.000/kg-Rp.30.000/kg (Utoyo, 2014). Hal ini telah menyebabkan banyaknya karkas daging ayam ilegal di wilayah Riau, Batam dan sekitarnya. Pada usaha layer, teknologi kandang ini mampu memberikan kapasitas kandang sampai 6 tingkatan untuk total 750 ribu ekor, dengan tenaga kerja yang diperlukan hanya 17 orang, termasuk seorang manager.

LANGKAH TINDAK LANJUT DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil pemaparan narasumber dan diskusi memberikan beberapa alternatif/opsi rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi langkah tindak lanjut, diantaranya adalah:

1. Kebijakan penetapan harga produk unggas selayaknya mempertimbangkan dinamika biaya produksi, dimana harga merupakan fungsi dari harga DOC, pakan, dan margin keuntungan produsen yang wajar. Perusahaan, peternak, pedagang dan konsumen saling membutuhkan dalam produk unggas, sehingga masing-masing harus dijaga untuk memperoleh keuntungan yang wajar.
2. Strategi dan kebijakan industri perunggasan menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015 harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan sektor pembibitan, pembesaran (budidaya), dalam hal penyediaan pakan, penentuan harga yang tepat agar dapat meningkatkan daya saing. Daya saing dan efisiensi usaha menjadi kata kunci untuk mencapai keberhasilan industri perunggasan nasional menuju era ini. Dengan demikian, perlu dikembangkan upaya peningkatan daya "sharing" industri perunggasan, sehingga mampu memanfaatkan kondisi yang ada di kawasan negara-negara ASEAN menuju kemakmuran bersama.
3. Indonesia pada saat ini belum memiliki suatu lembaga seperti Dewan Komoditas (*Board of Commodity*) sebagaimana industri perunggasan di negara lain. Dewan ini berfungsi untuk mengatur manajemen pasokan industri perunggasan antara lain melalui *checkoff program*, yang merupakan program pemasaran bersama guna meningkatkan permintaan pasar (domestik dan luar negeri), menjaga kestabilan harga output dan meningkatkan

penerimaan produsen, termasuk industri pengolahan. Di Amerika Serikat, Kanada, Australia dan beberapa negara Uni Eropa program ini dibiayai oleh pungutan wajib (*levy*) yang berasal dari para produsen yang terlibat dalam industri dan pembentukannya dilindungi oleh suatu undang-undang.

4. Perlu dipersiapkan matriks tentang kinerja industri perunggasan yang menunjukkan keterkaitan berbagai pihak, siapa melakukan apa untuk pengembangan industri perunggasan menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015.

Matriks Rencana Tindak Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015

| Rencana Tindak | Keluaran | Sasaran Waktu | Penanggung Jawab |
|---|---|---------------|--|
| I. UPAYA PENINGKATAN KESEIMBANGAN SUPPLY DAN DEMAND | | | |
| 1. Dokumentasi dan sinergisme tingkat konsumsi produk unggas yang akurat lintas institusi dalam negeri maupun internasional | Informasi tingkat konsumsi produk unggas nasional | 2014 - 2015 | BPS, FAO, Ditjen PKH, FMPI, PINSAR |
| 2. Perkiraan produksi DOC yang cermat untuk perencanaan jumlah GPS dan PS impor | Jumlah GPS dan PS bibit unggas yang harus diimpor | 2014 - 2015 | GPPU, Ditjen PKH, FMPI, Kemendag |
| 3. Penetapan harga DOC melalui <i>formula pricing</i> | Harga eceran DOC yang wajar | 2014 - 2015 | Ditjen PPHP, Kemendag, PINSAR |
| II. STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING | | | |
| 1. Standarisasi mutu produk unggas secara nasional dan regional (ASEAN) | Peningkatan mutu produk unggas | 2014 - 2015 | Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi, BSN, Ditjen PKH |
| 2. Implementasi teknologi "closed-housed" di sektor 3 dan 4 | Efisiensi produksi perunggasan nasional | 2014 - 2015 | Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi, Asosiasi, Ditjen PKH |
| 3. Akselerasi pembangunan RPA dan <i>cold chain</i> | Perubahan pola konsumsi daging olahan masyarakat | 2014 - 2015 | GPPU, Asosiasi, Kemendag |

| | | | |
|---|--|-------------|--|
| 4. Pembangunan infrastruktur menuju pasar tradisional yang <i>hygienis</i> | Distribusi pemasaran produk unggas yang berimbang | 2014 - 2015 | Pemda, Kemenkop dan UKM, PINSAR |
| 5. Edukasi dan promosi kepada konsumen terhadap produk unggas yang sehat | Kesadaran untuk mengkonsumsi produk unggas beku | 2014 - 2015 | YLKI, Pusat-pusat Penelitian, Perguruan Tinggi |
| 6. Peningkatan daya <i>sharing</i> industri perunggasan dengan negara-negara di kawasan ASEAN | Pemanfaatan potensi pasar yang ada secara regional | 2014 - 2015 | Kemendag, Swasta, BUMN/D |

III. KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN KEBIJAKAN

| | | | |
|---|--|-------------|---|
| 1. Perlunya subsidi bunga bank dari pemerintah | Skema kredit dengan bunga bank yang terjangkau | 2014 - 2015 | Perbankan, Kemenkeu |
| 2. Pembentukan Dewan Komoditas (<i>Board of Commodity</i>) industri perunggasan | Rekomendasi volume dan harga produk unggas nasional | 2014 - 2015 | Swasta, BUMN, PPHP, Ditjen PKH Kemendag |
| 3. Publikasi hasil evaluasi SE tentang harga penjualan DOC | Informasi terkini terkait dengan harga penjualan DOC di tingkat peternak | 2014 - 2015 | Kemendag, Ditjen PPHP, PINSAR |
| 4. Pembangunan infrastruktur yang memadai | Jaminan adanya konektivitas yang baik antar wilayah | 2014 - 2015 | Swasta/BUMN Kemen PU, Pemda |
| 5. Peningkatan strategi dan kebijakan industri perunggasan | Strategi dan kebijakan industri perunggasan menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015 | 2014 – 2016 | Kementan, Kemendag, Kemenkop dan UKM |

DAFTAR BACAAN

- ASEAN Economic Community Blue Print. 2008. ASEAN Secretariat. Jakarta, Indonesia.
- Daryanto, Arief. 2014. Indonesian poultry industry: challenges and opportunities. Makalah dipresentasikan dalam *Roundtable Meeting: Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta, 6 Mei 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Hartono. 2014. Ketua Umum Pusat Informasi Pasar Indonesia. *Personal communication. Roundtable Meeting: Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta, 6 Mei 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Kartabrata, Iskandar. 2014. Strategi peningkatan mutu dan daya saing produk perunggasan menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015. Strategic Business Unit, Commodity & Trade Solution. PT. SUCOFINDO (Persero). Makalah dipresentasikan dalam *Roundtable Meeting: Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta, 6 Mei 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Krissantoro, Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU). 2014. Broiler information. Makalah dipresentasikan dalam *Roundtable Meeting: Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta, 6 Mei 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- [SE] Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Nomor: 644/M-DAG/SD/4/2014 Tanggal 15 April 2014 tentang Harga Penjualan *Day Old Chicken* (DOC) di Tingkat Peternak.

- Martua Sihombing, Kementerian Perdagangan. 2014. Sektor perunggasan jelang ASEAN Economic Community (AEC). Makalah dipresentasikan dalam *Roundtable Meeting: Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta, 6 Mei 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- Soedjana, T.D. 2014. Partisipasi konsumsi sebagai alat ukur status ketahanan pangan daging. *Wartazoa* Vol 23 (4): 166-175.
- Utoyo, Don. 2014. Presiden Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia. *Personal communication. Roundtable Meeting: Strategi dan Kebijakan Industri Perunggasan Menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta, 6 Mei 2014. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Bogor.
- [WEF] World Economic Forum 2014. The Global Competitiveness Report 2013 - 2014

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Nomor: 24/Kpts/OT.160/I.5/2/2014 Tanggal 20 Pebruari 2014 Tentang Pembentukan Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, maka Tim dimaksud adalah:

TIM KAJIAN ANTISIPATIF DAN RESPONSIF KEBIJAKAN STRATEGIS PETERNAKAN DAN VETERINER

1. Prof (R) Dr. Syamsul Bahri, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Tjeppy D. Soedjana, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Kusuma Diwyanto, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Prof (R) Dr. Budi Haryanto, Balai Penelitian Ternak
5. Prof (R) Dr. Ismeth Inounu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
6. Dr. drh. Agus Wiyono, Balai Besar Penelitian Veteriner
7. Dr. drh. Suhardono, Balai Besar Penelitian Veteriner
8. Dr. Atien Priyanti, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
9. Dr. Eko Handiwirawan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
10. Dr. Wisri Puastuti, Balai Penelitian Ternak
11. Dr. Triana Susanti, Balai Penelitian Ternak
12. Dr. Harimurti Nuradji, Balai Besar Penelitian Veteriner
13. drh. Murni N. Rosyid, Balai Besar Penelitian Veteriner

TIM PERUMUS

1. Prof (R) Dr. Ir. Tjeppy D. Soedjana, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
2. Prof (R) Dr. Drh. Sjamsul Bahri, MS, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
3. Prof (R) Dr. Ir. Budi Haryanto, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
4. Dr. Wisri Puastuti, Balai Penelitian Ternak
5. Dr. Ir. Atien Priyanti, M.Sc, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

LAMPIRAN

SEKTOR PERUNGGANAN JELANG ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* (AEC)

Martua Sihombing

Kepala Pusat Kerjasama Perdagangan Internasional,
Kementerian Perdagangan

RINGKASAN

Selama tahun 2009-2013 defisit neraca perdagangan Indonesia dengan ASEAN cenderung meningkat, dan relatif menurun pada periode Januari-Februari 2013. ASEAN merupakan mitra dagang utama non migas Indonesia dengan pangsa 20,05%. Struktur ekspor Indonesia di awal tahun 2014 semakin membaik dimana kontribusi ekspor manufaktur meningkat dibandingkan tahun 2013 yang didominasi oleh komoditi primer yang mencapai 56,2%. Unggas bukan merupakan komoditas impor utama bagi Indonesia. Impor utama Indonesia didominasi oleh mesin, elektronik dan kendaraan. Pertumbuhan impor produk unggas menurun sangat signifikan dari USD 3.512.011 pada tahun 2009 menjadi USD 3.152.000 pada tahun 2013.

Industri perunggasan memegang peranan sangat penting dan mampu menghasilkan swasembada daging unggas maupun telur. Konsumsi daging ayam dan telur di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN, hal ini sebagai tantangan ke depan untuk dapat lebih ditingkatkan. Produk unggas termasuk dalam kriteria *inclusion list*, dimana sejak tahun 2010 Indonesia bersama 5 negara ASEAN lainnya telah menerapkan 0% bea masuk. Hal ini menunjukkan terbukanya peluang pasar yang cukup besar bagi produk

unggas Indonesia untuk melakukan ekspor ke negara-negara tersebut.

ASEAN belum melakukan harmonisasi standar untuk unggas sehingga Indonesia masih dapat menerapkan SNI dengan kualitas produk yang terus ditingkatkan. ASEAN belum melakukan *review* secara mendalam berkaitan dengan kebijakan *non-tariff* negara-negara ASEAN sehingga kebijakan perlindungan dalam negeri dalam rangka pengamanan industri dalam negeri masih sangat relevan dilakukan. Dalam rangka pengamanan pasar perunggasan dalam negeri, Indonesia perlu mempersiapkan model-model standar yang akan ditetapkan di kemudian hari sebagai *non tariff barrier*.

BROILER INFORMATION DAN ESTIMASI PRODUKSI TAHUN 2014

Krissantono

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas
Indonesia

RINGKASAN

Sepenuhnya Indonesia masih sangat tergantung terhadap pasokan GPS impor, dimana masing-masing meningkat sebesar 22,45% dan 35,10% untuk broiler dan layer pada periode tahun 2012-2013. Diperkirakan hal tersebut menurun signifikan pada tahun 2014, masing-masing sebesar 206,47% (216.867 ekor) dan 255,52% (12.290 ekor) untuk broiler dan layer. Peningkatan impor GPS dari tahun ke tahun ditengarai sebagai penyebab kerugian peternak yang berkepanjangan sejak akhir tahun 2013. Harga ayam hidup (*live bird*) berada jauh dibawah harga pokok produksi (HPP) yang disebabkan oleh harga DOC dan pakan yang terus meningkat. Dugaan *over supply* terjadi akibat perusahaan pembibitan yang memproduksi DOC broiler melebihi angka kebutuhan, disamping banyak bermunculan breeding farm baru baik di Jawa maupun luar Jawa.

Tingkat konsumsi produk unggas masyarakat Indonesia yang relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia menunjukkan bahwa industri perunggasan memiliki prospek yang sangat baik ke depan. Industri ini perlu terus didorong untuk dapat lebih berdaya saing guna memenuhi kebutuhan di dalam negeri, sekaligus peluang pasar ekspor ke negara-negara ASEAN. Potensi produksi ayam umur sehari (*day old chicks* =

DOC) broiler pada tahun 2014 mencapai 2,47 Milyar ekor dengan rata-rata produksi sebesar 47 juta ekor per minggu dan DOC layer mencapai 2,25 juta ekor per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa industri perunggasan memiliki peranan yang sangat strategis sebagai pemasok utama protein hewani asal ternak. Namun industri perunggasan belum memiliki tim yang solid untuk menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015.

STRATEGI PENINGKATAN MUTU DAN DAYA SAING PRODUK PERUNGGSAN MENGHADAPI PASAR TUNGGAL ASEAN 2015

Iskandar Katmadibrata

Strategic Business Unit, Commodity & Trade Solution,
PT. SUCOFINDO (Persero)

RINGKASAN

Mutu produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil / kinerja yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Agar mempunyai daya saing, maka industri perunggsan harus memiliki infrastuktur yang memadai dan dukungan permodalan. Diperlukan regulasi bidang perbankan (terutama bank pemerintah) bagi industri perunggsan, agar dapat memperoleh pemberian bunga bank yang rendah bagi petani unggas, seperti halnya pada peternak sapi. Dengan demikian petani unggas dapat mengatur infrastuktur menjadi lebih baik.

Peningkatan kemampuan bersaing produk perunggsan perlu dilakukan melalui upaya penerapan teknologi yang lebih maju, penyediaan sarana yang lebih baik, peranan pemerintah yang pro-peternak unggas, perencanaan usaha yang mantap dengan didukung oleh data yang akurat, sumberdaya manusia yang berkualitas, peraturan pemerintah yang kondusif, penanganan kesehatan dan kesejahteraan unggas yang memadai (*animal health and welfare*), pengembangan model industri perunggsan yang sesuai secara nasional dengan adanya konektivitas yang baik antar wilayah. Strategi peningkatan mutu dan daya saing produk perunggsan menghadapi Pasar Tunggal ASEAN meliputi: (i) Kolaborasi

proaktif dari pemangku kepentingan industri perunggasan nasional dalam membangun mutu dan daya saing; (ii) Membangun *evidence base* guna mendukung harmonisasi atas adanya perbedaan regulasi, misalnya melalui analisis mendalam terhadap regulasi nasional saat ini, identifikasi inkonsistensi penerapan, penyebab dan solusinya; (iii) Melakukan kajian terhadap penerapan kebijakan perdagangan ASEAN, misalnya penerapan *non tariff barrier* pada produk berbasis unggas, keuntungan bagi industri dan ekonomi nasional maupun ASEAN; dan (iv) Konsisten mengedepankan prinsip-prinsip pengembangan regulasi baru, antara lain: *good governance*, *impact assessment*, *scientific basis-proportionality* dan *non-discrimination*, serta *open consultation*

TANTANGAN, KENDALA DAN STRATEGI USAHA PERUNGGSAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING MENGHADAPI PASAR TUNGGAL ASEAN 2015

Hartono

Ketua Umum PINSAR

RINGKASAN

Selama ini pemerintah lebih memperhatikan usaha peternakan ayam dalam skala besar dibandingkan dengan peternakan rakyat. Seringkali harga telur dan ayam jauh di bawah harga pokok produksi (HPP) peternakan, sehingga banyak peternak merugi. Terjadinya kelebihan produksi DOC memaksa penurunan harga DOC dibawah HPP agar produk dapat diserap, sehingga produsen pembibitan merugi. Kadangkala harga ayam hidup (*live bird*) berada jauh dibawah HPP yang disebabkan oleh tingginya harga DOC diawal produksi dan pakan yang terus meningkat. Pada tahun 2009 sebelum ada KPPU, produsen dapat melakukan musyawarah untuk menentukan harga, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan lagi saat ini. Bantuan pemerintah sangat diharapkan pada terjadinya kasus seperti ini

Dalam kondisi normal harga DOC yang wajar adalah Rp.4.500/ekor– Rp. 5.000/ekor (HPP: Rp.4.100/ekor – Rp.4.300/ekor); harga ayam hidup adalah Rp. 18.500/kg – Rp.20.000/kg (HPP: Rp.16.750/kg – Rp.17.000/kg); harga karkas daging ayam sekitar Rp.32.000/kg – Rp.35.000/kg (HPP: Rp.31.000/kg – Rp.33.000/kg); dan harga telur sebesar Rp. 18.500/kg – Rp.20.000/kg (HPP: Rp.16.500/kg – Rp. 17.00/kg). Untuk menjamin kondisi harga perunggsan tetap normal diperlukan regulasi yang memihak peternak rakyat. Pemerintah

sebenarnya dapat mengoptimalkan aturan-aturan yang tercantum didalam Undang-undang Pangan maupun Undang-undang Pemberdayaan Petani sebagai payung hukum untuk pengaturan tersebut, seperti halnya Undang-undang No. 17/2014 tentang Perdagangan yang baru saja diselesaikan sudah dapat digunakan walaupun belum ada Peraturan Pemerintahnya.

Sudah selayaknya Pemerintah dapat mengatur tata niaga perunggasan dengan memberikan keuntungan yang wajar bagi produsen, termasuk peternak. Pengaturan tersebut meliputi harga DOC, harga ayam hidup, harga karkas daging ayam dan harga telur ayam. Pengaturan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian, beberapa kementerian perlu bekerja sama untuk mengatur kebijakan guna memajukan industri perunggasan.

INDONESIAN POULTRY INDUSTRY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Arief Daryanto

Direktur Magister Bisnis Institut Pertanian Bogor

RINGKASAN

Daging unggas menyumbang hampir 62,6% produksi total daging nasional. Rata-rata konsumsi daging unggas terus meningkat meskipun capaian masih rendah sebesar 7,8 kg per kapita per tahun. Salah satu penyebabnya karena adanya pergeseran pola konsumsi dari daging merah ke daging putih (unggas). Industri perunggasan di Indonesia terbagi dalam dua tipe yakni modern di sektor perbibitan dan tradisional di sektor budidaya.

Kunci industrialisasi bidang perunggasan antara lain peningkatan permintaan, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan pendapatan, peningkatan golongan/kelas menengah, urbanisasi, usia dalam populasi; diversifikasi makanan, peningkatan produk siap masak, dan lain-lain. Tantangan dan peluang pengembangan industri perunggasan terbuka luas. Tantangan dalam industri perunggasan meliputi harga bahan pakan, serangan flu burung (AI), masih banyaknya pasar tradisional, keterbatasan pengawasan dan koordinasi akan suplai, sulitnya pembiayaan, ancaman impor paha ayam, rendahnya infrastruktur, kurang promosi, sulitnya birokrasi dan kebijakan yang tidak konsisten. Peluang bagi industri perunggasan meliputi pertumbuhan permintaan domestik, konsumsi per kapita yang rendah, ayam adalah sumber protein termurah, risiko harga bergeser dari petani ke integrator, menurunnya pasar tradisional, perkembangan teknologi, dan lain-lain.

Dalam menghadapi pasar Tunggal ASEAN harus dipandang sebagai peluang pasar yang sangat besar bagi industri perunggasan baik di dalam negeri maupun di pasar regional, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang sangat signifikan. Strategi dan kebijakan industri perunggasan menjelang Pasar Tunggal ASEAN 2015 perlu memberikan solusi secara holistik yang melibatkan sektor pembibitan, pembesaran (budidaya), penyediaan pakan, penentuan harga yang tepat agar dapat meningkatkan daya saing. Daya saing dapat dicapai bila mengedepankan efisiensi produksi melalui transformasi usaha dari semi intensif menjadi intensif dan mewujudkan keunggulan komparatif menjadi kompetitif.



ISBN : 978-602-8475-84-6

Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151

Telp. (0251) 8322185, 8322138

Fax. (0251) 8328382, 8380588

E-mail : riansci@indo.net.id